

EVALUASI PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN HALMAHERA UTARA BERDASARKAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Herdfil Silkerao Tambariki¹, Sangkertadi², Sonny Tilaar³

¹Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Unsrat, ^{2&3}Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Unsrat
E-mail: Herdfil03@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan pesisir merupakan pusat yang didalamnya ada kegiatan ekonomi nasional dengan berbagai kegiatan regional misalnya perikanan laut, perdagangan, budidaya, transportasi, pariwisata, pengeboran minyak dan banyak lagi. Pembangunan Permukiman Pesisir Mempengaruhi Kondisi Lokal. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) yang mana adalah bagian penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Kabupaten Halmahera Utara serta dilanjutkan untuk mengevaluasi pemanfaatan ruang kawasan pesisir di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan RZWP-3-K Provinsi Maluku Utara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teknik analisis data memakai metode deskriptif untuk mengidentifikasi pemanfaatan ruang kemudian dilanjutkan Analisis spasial yang adalah sekumpulan dari teknik yang bisa digunakan untuk melakukan pengolahan data SIG untuk mengevaluasi pemanfaatan ruang kawasan pesisir di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan RZWP-3-K, berdasarkan identifikasi ditemui pemanfaatan ruang dengan beberapa zonasi yaitu zona permukiman, zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona pelabuhan, kawasan konservasi, alur pelayaran, alur pipa dan kabel bawah laut, alur migrasi biota laut, berdasarkan analisis yang dilakukan dengan hasil evaluasi didapatkan bahwa pemanfaatan ruang kawasan pesisir di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan RZWP-3-K Provinsi Maluku Utara dalam aspek struktur ruang hanya memiliki bobot 24,09 % dan untuk pola ruang hanya memiliki 24 % dengan keseluruhan nilai bobot 48,09 % yang diklasifikasikan yaitu tingkat kesesuaian sedang (>25%-50%), artinya pemanfaatan ruang masih belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang atau aturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Evaluasi, Observasi, Pemanfaatan Ruang, Pesisir, Spasial, SIG*

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir adalah bagian dari pusat kegiatan ekonomi nasional dengan berbagai kegiatan wilayah misalnya perikanan laut, budidaya, perdagangan, pariwisata, transportasi dan tambang minyak. Wilayah pesisir juga merupakan lingkungan laut yang paling produktif dengan sumber daya laut, terutama mangrove, terumbu karang, padang lamun, daerah pasang surut dan lepas pantai, dengan produktivitas tinggi, perdagangan valuta asing, lapangan kerja dan pendapatan penduduk dan kekayaan.

Berkembangnya permukiman dengan kondisi pesisir mempengaruhi kondisi lokal.

Dampak tersebut meliputi pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi dan sosial, perkembangan industri dan pariwisata, serta dampak lingkungan positif dan negatif yang ditimbulkannya.

Rencana Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan salah satu perangkat untuk mengatur pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengesahan RZWP-3-K menjadi peraturan daerah merupakan amanat Pasal 7(3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Halmahera Utara adalah sebuah kabupaten di Maluku Utara dengan Kecamatan Tobelo sebagai Ibukotanya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah

3.891,62 km persegi dan berpenduduk 197.638 jiwa pada tahun 2020. Halmahera Utara terdiri dari, perkebunan, sektor pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, kelautan, industri kecil, pertambangan, dan pariwisata.

Sebagai wilayah yang memiliki kawasan pesisir yang luas, permasalahan yang muncul akibat dari pertumbuhan dan perkembangan penduduk, kawasan pesisir di Halmahera Utara mulai mengalami degradasi lingkungan pesisir karena berbagai kegiatan pemanfaatan ruang pesisir yang tidak terkontrol dengan baik antara lain dengan adanya kegiatan pertambangan. Selain itu mulai terjadi perubahan fungsi lahan dari lahan konservasi menjadi lahan terbangun.

Oleh karena itu diperlukan melakukan penelitian terkait dengan pemanfaatan ruang kawasan pesisir untuk mengidentifikasi pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Kabupaten Halmahera Utara serta dilanjutkan untuk mengevaluasi pemanfaatan ruang kawasan pesisir di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan RZWP-3-K Provinsi Maluku Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi

Kata evaluasi adalah bahasa inggris yaitu "evaluation" yang memiliki arti sebagai penilaian atau penaksiran. Evaluasi sendiri ialah proses penilaian, yang mana penilaian yang dilakukan ini bisa netral, positif, negatif, atau kombinasi keduanya.

a) Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai bentuk pemantauan dan pengendalian pelaksanaan suatu rencana setelah disusun untuk dapat dipastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang (Ibrahim, 1998). Diidentifikasi sambil menghindari potensi penyimpangan dalam pemanfaatan ruang. Pengawasan ini berfokus pada pengamatan, pemantauan dan uji tuntas terhadap penataan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang dan perubahan kualitas lingkungan. Pemantauan

berkala terhadap perubahan yang terjadi baik tata ruang dan lingkungan yang dilakukan baik oleh pemerintah kabupaten atau kota yang ada di daerah tersebut. Pengawasan ini menjadi tanggung jawab aparaturnya Pemerintah daerah sebagai kelanjutan dari rencana yang telah disusun setiap tahun setelah rencana pengelolaan disetujui.

Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah seperangkat alat terkomputerisasi yang memproses data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang relevan tentang permukaan bumi, memungkinkan data untuk dikumpulkan, disimpan, dimanipulasi, dianalisis, dan ditampilkan. Materi/kebijaksanaan yang menentukan

Informasi spasial menggunakan lokasi dalam sistem koordinat yang diatur sebagai referensi. Oleh karena itu GIS memiliki kemampuan untuk menghubungkan, menggabungkan, menganalisis dan akhirnya memetakan hasil data yang berbeda pada titik-titik tertentu di dunia. Aplikasi GIS memiliki fitur yang ada seperti lokasi, kondisi, tren, pola dan pemodelan. Fitur ini membedakan GIS dari sistem informasi yang ada. Menurut definisi, GIS adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang tidak dapat berfungsi secara terpisah.

Analisis Spasial

Analisis spasial adalah teknik atau proses yang didalamnya membahas tentang evaluasi dari serangkaian perhitungan dan logika matematika yang dilakukan untuk menemukan atau mencari hubungan yang melibatkan elemen geografis. Sedangkan rincian tentang teknik, evaluasi, jenis fungsi, operator matematika atau logika yang digunakan di dalamnya tergantung pada jenis atau sifat (*query*) dari analisis spasial itu sendiri (Prahasta, 2009).

Salah satu jenis analisis spasial dalam GIS adalah overlay. Overlay adalah analisis spasial penting yang menggabungkan data layer/tematik ke input. Analisis overlay adalah proses sistem

informasi geografis (SIG) untuk memperoleh informasi baru dengan interpolasi atau overlay informasi dari dua peta atau dua atau lebih set data spasial. Analisis overlay biasanya proses overlay peta tematik.

Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang Menurut UU RI NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG dengan susunan dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun serta pendanaannya, upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang menurut rencana tata ruang adalah pemanfaatan ruang dalam pengendaliannya, dan pemanfaatan ruang dalam pengendaliannya adalah usaha untuk mewujudkan ketertiban tata ruang.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Zoning atau zonasi adalah pembagian suatu kawasan menjadi beberapa zona dengan menyesuaikan berdasarkan karakteristik dan fungsi aslinya atau pengembangan fungsi lainnya. Peraturan zonasi, di sisi lain, dapat didefinisikan sebagai zona dasar, peraturan penggunaan, peraturan penggunaan, klasifikasi peraturan, notasi dan peraturan kodifikasi. Regulasi pembangunan dan berbagai prosedur pelaksanaan pembangunan. Peraturan zonasi tentang penyelenggaraan penataan ruang merupakan salah satu alat untuk mengendalikan pemanfaatan ruang..

Secara garis besar dalam RZWP3K mengatur tentang:

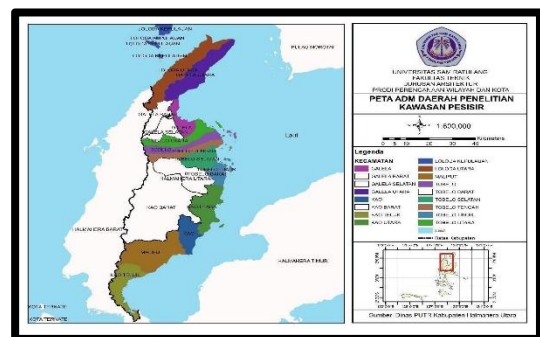
- a) kawasan pemanfaatan umum yang didalamnya mengatur tentang: Zona permukiman Zona perikanan tangkap Zona perikanan budidaya Zona pariwisata Zona pelabuhan Zona fasilitas umum.
- b) Kawasan konservasi
- c) Kawasan strategi nasional tertentu
- d) Alur laut yang didalamnya mengatur tentang: Alur pelayaran dan Perlintasan Alur pipa dan kabel bawah laut Alur migrasi biota laut

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dimana metode penelitian ini lebih ditekankan pada elaborasi interpretasi dari sebuah fenomena tanpa bergantung pada pengukuran secara numerik. Adapun data pendukung dalam metode penelitian yang dilakukan yaitu berupa data-data sekunder yang berisi tentang gambaran umum dan informasi-informasi terkait wilayah studi yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang ada di internet.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 13 Kecamatan yang berada di pesisir Kabupaten Halmahera Utara yang sebelumnya berjumlah 17 kecamatan pada tahun 2021 jika ditambahkan dengan 4 Kecamatan yang tidak berada di kawasan pesisir, 13 Kecamatan wilayah pesisir yaitu meliputi: Kecamatan Loloda Kepulauan, Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Galela Utara, Kecamatan Galela, Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Mailfut. Dengan luasan dari 13 Kecamatan wilayah pesisir ini yang dihitung menggunakan perangkat Arcgis seluas 222.917,21 ha



Gambar 1. Peta Administrasi Deliniasi Wilayah Pesisir Kabupaten Halmahera Utara

Populasi dan Sampel

Populasi yg dipergunakan sebagai objek penelitian yaitu pada kabupaten Halmahera Utara

dengan luas Kabupaten sebesar 3.891,62 km² menggunakan jumlah penduduk 190.531 jiwa (2018), tetapi sesuai deliniasi penelitian yang mana hanya di kawasan pesisir yaitu hanya 13 kecamatan asal 17 kecamatan yang terdapat di kabupaten ini.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto (1998), metode untuk mengumpulkan data adalah metode yang efektif digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitian. Pengumpulan data sangat penting karena data yang diperoleh sangat mempengaruhi proses dan hasil penelitian. Oleh karena itu, untuk memperoleh data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode-metode di bawah ini, perlu dilakukan pengumpulan data dengan teknik yang tepat tergantung pada data yang akan dicari:

a) Pengumpulan data primer.

Pengumpulan data utama merupakan metode penelitian yang dilakukan menggunakan terjun eksklusif kelapangan. kuesioner data primer dilakukan secara pribadi oleh pengumpul data (surveyor) serta wawancara dengan cara, observasi visual direkam serta disimpan (foto, film, ataupun sketsa) dan wawancara (responden) sesuai dengan kondisi eksisting, Selain itu observasi dilakukan buat validasi peta. Observasi visual akan dilakukan setiap daerah pengamatan menggunakan cara seperti pengambilan foto. Fitur observasi digunakan untuk menguji keakuratan interpretasi dan juga digunakan untuk menentukan posisi sampel di dalam lapangan dengan menggunakan Global Positioning System (GPS)

b) Pengumpulan data sekunder

Metode terdokumentasi memungkinkan data dikumpulkan dari lembaga terkait atau di Internet dengan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Peta Administratif Kabupaten Halmahera Utara, Peta Batas Pesisir Kabupaten Halmahera

Utara, Peta Tata Guna Lahan Kabupaten Harut 1999 dari Peta RBI, Peta Pemanfaatan Ruang RZWP3K.

Teknik Analisa Data

Dalam tekniknya penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan teknik analisis data deskriptif. untuk mengidentifikasi pemanfaatan ruang kemudian dilanjutkan analisis spasial yang adalah sekumpulan dari teknik yang bisa digunakan untuk melakukan pengolahan data SIG untuk mengevaluasi pemanfaatan ruang kawasan pesisir di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan RZWP-3-K.

HASIL DAN PEMBAHASAN

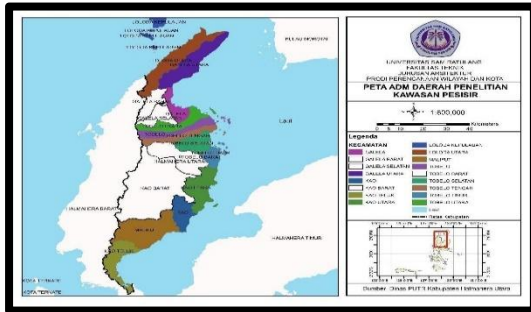
Gambaran Umum Wilayah Studi

Kabupaten Halmahera Utara dalam angka menjelaskan bahwa Kabupaten Halmahera Utara sendiri terletak antara 1^o57' Lintang Utara dan 2^o00' Lintang Utara dan antara 128^o17' Bujur Timur dan 128^o18' Bujur Timur. Dan untuk posisi geografisnya, Kabupaten Halmahera Utara memiliki batas yang berbatasan dengan daerah lainya yaitu:

- Bagian Utara – Selat Morotai;
- Bagian Selatan – Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bagian Barat – Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu dan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bagian Timur – Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur dan Laut Halmahera.

Kabupaten Halmahera Utara sendiri terdiri dari tujuh belas kecamatan namun berdasarkan ruang lingkup penelitian ini hanya kecamatan yang berada pada kawasan pesisir saja yaitu 13 kecamatan, yaitu Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Galela, Kecamatan Galela Utara, Kecamatan Loloda Utara, dan Kecamatan Loloda Kepulauan. Untuk

gambaran lebih jelas bisa dilihat pada Gambar peta berikut:

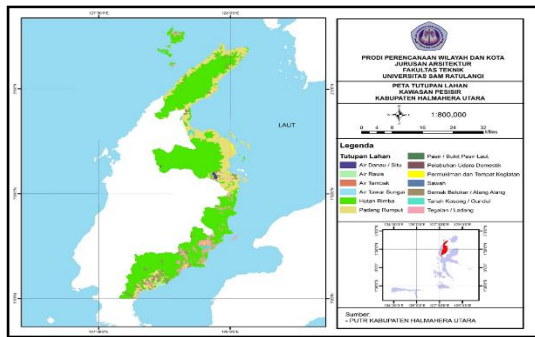


Gambar 2. Peta administrasi daerah penelitian

Berdasarkan data BPS yang diperoleh kecamatan-kecamatan dan ibukota kecamatan beserta luasnya yang telah dibatasi dengan daerah khusus kawasan pesisir yang didalamnya ada 13 kecamatan, kemudian kecamatan yang memiliki daerah paling luas di kawasan pesisir adalah Kecamatan Galela Utara dengan luas 615,41 km²/sq.km, sedangkan Kecamatan yang lebih kecil dari semua kecamatan di daerah pesisir yaitu Kecamatan Tobelo Tengah dengan luas 33,51 km²/sq.km.

Tutupan Lahan

Kabupaten Halmahera Utara, dengan menggunakan skala 1:800.000 yang mana untuk tutupan lahan yang mendominasi oleh Hutan Rimba di kawasan deliniasi pesisir, berikut petanya:

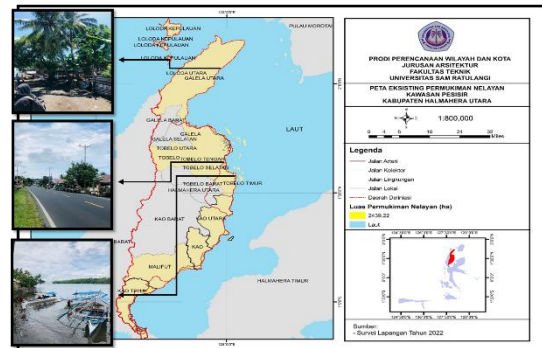


Gambar 3. Peta Tutupan Lahan Kawasan Pesisir Kabupaten Halmahera Utara

Mengidentifikasi Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Pesisir Kabupaten Halmahera Utara

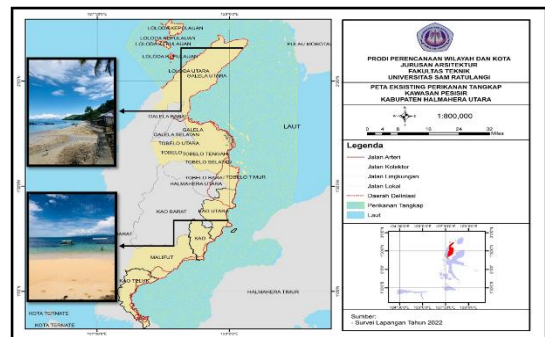
1. Kondisi Eksisting Kawasan Pemanfaatan Umum

Kondisi eksisting Zona permukiman nelayan tersebar di setiap kecamatan yaitu 13 kecamatan yang ada di Kawasan Pesisir Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan, dengan luas zona permukiman 2.439,22 hektar.



Gambar 4. Peta Eksisting Zona Permukiman Deliniasi Kawasan pesisir Kabupaten Halmahera Utara

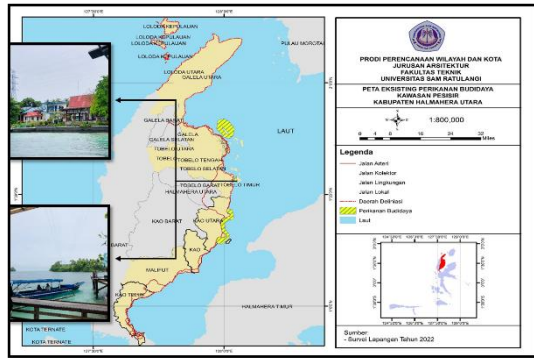
Zona perikanan tangkap masyarakat Deliniasi Kawasan Pesisir Kabupaten Halmahera Utara hanya sekitar 50 sampai 100 meter dari pesisir pantai di semua Kecamatan yang berada di wilayah pesisir, yang biasanya masyarakat pesisir sering terjadi kegiatan penangkapan ikan.



Gambar 5. Peta Eksisting Zona Perikanan Tangkap Deliniasi Kawasan Pesisir Kabupaten Halmahera Utara

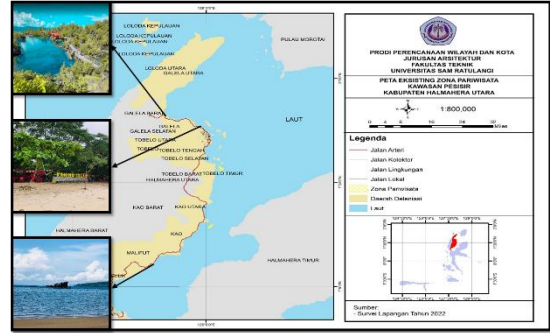
Zona perikanan budidaya di Deliniasi Kawasan pesisir Kabupaten Halmahera Utara

berlokasi di Perairan Pulau Metti Kecamatan Tobelo Timur, yang dijumpai adanya keramba jarring apung untuk tempat budidaya ikan oleh masyarakat dan juga budidaya ikan di Pulau Gumilamo oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan namun untuk saat ini belum beroperasi kembali, kemudian di Perairan Pulau Tolonuo, dan Perairan Kecamatan Kao Utara, dengan luas keseluruhan kondisi eksisting zona perikanan budidaya sebesar 9.192,62 ha.



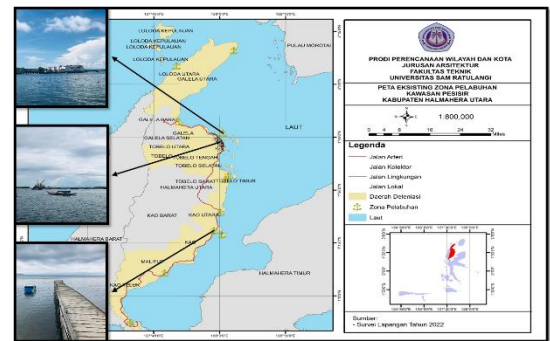
Gambar 6. Peta Eksisting Zona Perikanan Budidaya Di Deliniasi Kawasan Pesisir Kabupaten Halmahera Utara

Zona pariwisata di Deliniasi Kawasan Pesisir Kabupaten Halmahera Utara dimiliki oleh Kecamatan Kecamatan Wilayah Pesisir diantaranya adalah Kecamatan Malifut, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Galela, Kecamatan Galela Utara, Kecamatan Loloda Kepulauan, dengan kondisi pengelolaan yang cukup baik dari segi fasilitas dan aksesibilitas dari berbagai jenis wisatanya baik wisata alam pantai, wisata olahraga air dan wisata sejarah, namun untuk Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Utara, dan Kecamatan Loloda Utara memiliki banyak potensi untuk kawasan pariwisata namun belum adanya pengelolaan baik dari pemerintah setempat maupun dari masyarakat setempat.



Gambar 7. Peta Eksisting Zona Pariwisata Di Deliniasi Kawasan Pesisir Kabupaten Halmahera Utara

Zona pelabuhan yang tersebar hampir di setiap Kecamatan Kawasan Pesisir dengan akses transportasi laut yang ada di Kabupaten Halmahera Utara yang menghubungkan ibu kota Tobelo dengan beberapa wilayah di sekitarnya, kemudian untuk akses dari luar Kabupaten Halmahera Utara dan juga dari dari luar Pulau Halmahera, terdapat jalur transportasi yang menghubungkan Bitung (Sulawesi Utara) dengan Kabupaten Halmahera Utara.

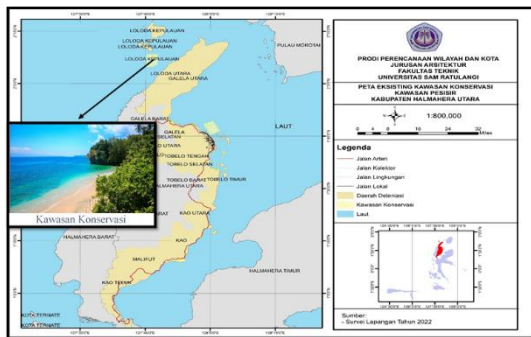


Gambar 8. Peta Eksisting Zona Pelabuhan Di Deliniasi Kawasan Pesisir Kabupaten Halmahera Utara

2. Kondisi Eksisting Kawasan konservasi

Kondisi eksisting kawasan konservasi di Deliniasi Kawasan Pesisir Kabupaten Halmahera Utara terdapat di Perairan Tobo-tobo Kecamatan Loloda Kepulauan, belum diketahui luasan untuk kawasan konservasinya namun menurut keterangan narasumber dari wawancara di lapangan perairan

Tobo-tobo sudah mulai menjadi kawasan yang dilindungi oleh masyarakat sekitar dan pemerintah untuk kelestariannya.



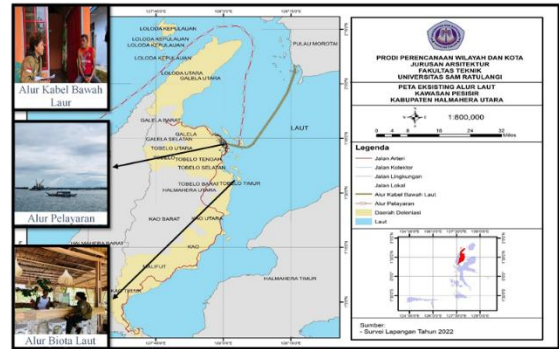
Gambar 9. Peta Eksisting Kawasan Konservasi di Deliniasi Kawasan Pesisir Kabupaten Halmahera Utara

3. Alur pelayaran dan Perlintasan

Kondisi eksisting untuk alur pelayaran dan perlintasan terdapat di Pelabuhan Tobelo Kecamatan Tobelo dan pelabuhan kapal feri Gorua di Kecamatan Tobelo Utara dengan memiliki pelabuhan yang melayani perlintasan antar wilayah sekitarnya di antaranya ke Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Timur kemudian untuk antar Provinsi yaitu ke Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

Kondisi eksisting alur pipa dan kabel bawah laut di Deliniasi Kawasan Pesisir Halmahera Utara menurut narasumber dengan wawancara yang dilakukan bahwa adanya kabel bawah laut yang menghubungkan Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Pulau Morotai.

Kondisi eksisting alur migrasi biota laut di Deliniasi Kawasan Pesisir Kabupaten Halmahera Utara menurut keterangan para narasumber bahwa untuk alur migrasi biota laut yaitu lumba-lumba dan paus sebagai mamalia laut yang hampir terlihat melintasi sepanjang perairan yang ada di garis pantai pesisir Kabupaten Halmahera Utara, berikut dokumentasi wawancara salah satu alur migrasi biota laut yaitu di Pulau Magaliho, Kecamatan Tobelo Timur.



Gambar 10. Peta Alur Laut di Deliniasi Kawasan Pesisir Kabupaten Halmahera Utara

Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan RZWP-3-K

1. Evaluasi Kawasan Pemanfaatan Umum

Tabel 1. Tabel Evaluasi Kawasan Pemanfaatan Umum

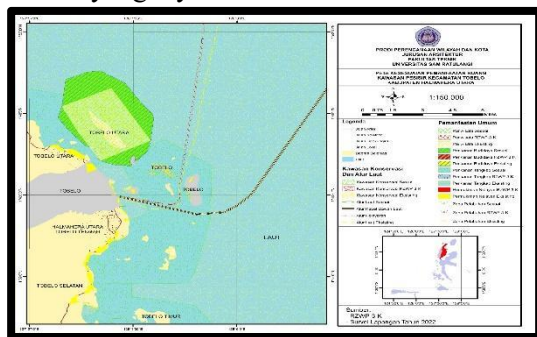
Kawasan Pemanfaatan Umum	Kesesuaian %	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Zona Perikanan Tangkap	100%	Sesuai
Zona Perikanan Budidaya	92%	Sesuai
Zona Wisata	100%	Sesuai
	0%	Tidak Sesuai
	10,2%	Tidak Sesuai
Zona Pelabuhan	62%	Belum Sesuai

Pemanfaatan Umum untuk Zona Perikanan Tangkap diklasifikasikan sudah sesuai namun keadaan dilapangan menjelaskan beberapa penyimpangan atau melebihi batas zonasi yang direncanakan karena faktor kondisi perubahan ekosistem laut sehingga ikan-ikan harus lebih memperluas zona penangkapan oleh nelayan.

Zona Perikanan Budidaya belum sesuai karena memiliki beberapa faktor permasalahan salah satunya yaitu Pulau Gumilamo yang dulunya menjadi destinasi untuk budidaya ikan di Kecamatan Tobelo Timur namun untuk sekarang sudah tidak berjalan dengan baik dan pembudidayaan ikan sudah berkurang dan juga faktor pengelola perikanan budidaya oleh masyarakat tidak berlanjut karena masyarakat yang bersangkutan meninggal dunia

Zona Wisata dibagi menjadi 3 jenis yaitu wisata alam pantai dengan klasifikasi sudah sesuai namun ada beberapa potensi wisata alam pantai di seluruh pesisir Kabupaten Halmahera Utara namun belum dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, wisata olahraga air dengan klasifikasi tidak sesuai karena rencana zonasi yang direncanakan kurang terurus berdasarkan data di lapangan sehingga untuk saat ini wisata olahraga air berada di kawasan yang lebih terawat oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat yaitu di Pulau Kahino, kemudian wisata sejarah diklasifikasi tidak sesuai karena berdasarkan data di lapangan salah satunya wisata kapal karam pada perang dunia II di Kecamatan Kao yang berpotensi menjadi zona wisata sejarah namun tidak dikelola dengan baik.

Zona Pelabuhan belum sesuai karena berdasarkan data di lapangan beberapa pelabuhan di Kecamatan Pesisir belum memenuhi kriteria untuk pelabuhan yang layak.



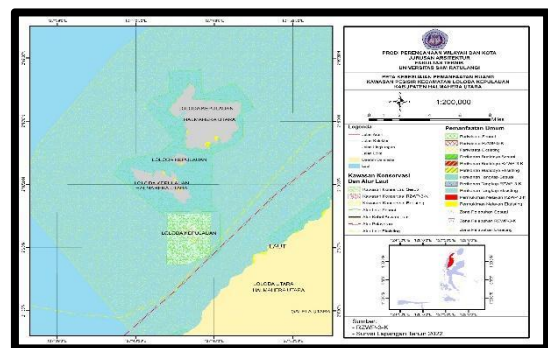
Gambar 11. Peta Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kecamatan Tobelo Berdasarkan RZWP-3-K dengan Kondisi Eksisting

2. Evaluasi Kawasan Konservasi

Tabel 2. Tabel Evaluasi Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi	Kesesuaian %	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	100%	Sesuai

Hasil evaluasi untuk Kawasan Konservasi yaitu kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil diklasifikasikan sudah sesuai dengan aturan yang ada dengan kondisi eksisting namun ditemui dilapangan ada beberapa kawasan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi dengan melihat kondisi yang memprihatinkan jika kehilangan kelestarian alam dan dapat merugikan untuk kedepanya contohnya terjadinya abrasi akibat gelombang laut.



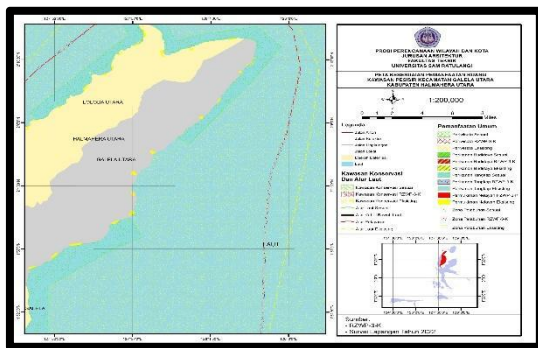
Gambar 12. Peta Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kecamatan Loloda Kepulauan Berdasarkan RZWP-3-K dengan Kondisi Eksisting

3. Evaluasi Alur Laut

Tabel 3. Tabel Evaluasi Alur Laut

Alur Laut	Kesesuaian %	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Alur Pelayaran	0%	Tidak Sesuai
Alur Pipa/Kabel Bawah Laut	100 %	Sesuai
Alur Migrasi Biota Laut	100 %	Sesuai

Untuk hasil evaluasi alur laut diantaranya yaitu alur pelayaran dikategorikan tidak sesuai berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Perhubungan bahwa untuk alur pelayaran yang direncanakan seharusnya sudah terlaksana namun dikarenakan kurangnya penumpang dalam jalur transportasi laut sehingga pihak kapal mengalami kerugian jika diteruskan, alur pipa atau kabel bawah laut diklasifikasikan sudah sesuai, kemudian untuk alur migrasi biota laut diklasifikasikan sudah sesuai bahkan berdasarkan data survei lapangan bahwa migrasi biota laut contohnya lumba-lumba sering berenang sepanjang pesisir pantai yang ada di Kabupaten Halmahera Utara.



Gambar 13. Peta Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kecamatan Galela Utara Berdasarkan RZWP-3-K dengan Kondisi Eksisting

Hasil Penilaian Tata Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan RZWP-3-K Maluku Utara diperoleh dengan menggunakan Pedoman Pekerjaan Umum Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang, yaitu Tata Ruang Berdasarkan Pembobotan. Pembobotan harus nilai objektif sebagai rumusnya dengan hasil penilaian sebagai landasan untuk merumuskan rekomendasi tindakan lebih lanjut. Berikut tabel pembobotan kriteria dan indikator:

Tabel 4. Tabel Pembobotan kriteria dan indikator

No	ASPEK	BOBOT (%)	
		PROVI NSI	KABUPA TEN
A	Konsistensi Struktur Ruang	60	40
1	Sistem Pusat Pelayanan	20	20
2	Sistem Jaringan Prasarana	40	20
B	Konsistensi Pola Ruang	40	60
1	Kawasan Lindung	20	30
2	Kawasan Budidaya	20	30

Kawasan deliniasi penelitian yang diambil memiliki bobot dalam kelas Kabupaten yang dimana untuk konsistensi struktur ruang nya memiliki bobot 40% dan konsistensi pola ruang nya memiliki bobot 60%, yang dapat dihitung bahwa untuk evaluasi pemanfaatan ruang kawasan pesisir di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan RZWP-3-K Provinsi Maluku Utara dalam aspek struktur ruang hanya memiliki bobot 24,09 % dan untuk pola ruang hanya memiliki 24 % dengan keseluruhan nilai bobot 48,09 % yang diklasifikasikan yaitu tingkat kesesuaian sedang (>25%-50%), dalam artian pemanfaatan ruang di daerah penelitian masih sepenuhnya belum sesuai dengan rencana tata ruang atau aturan yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Hasil identifikasi pemanfaatan ruang di Kawasan Pesisir Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan data eksisting di lapangan bahwa Zona permukiman nelayan memiliki luas 2.439,22 hektar, zona perikanan tangkap sekitar 50 sampai 100 meter dari pesisir pantai di semua Kecamatan, zona perikanan budidaya dengan luas keseluruhan kondisi eksisting sebesar 9.192,62 ha, zona pelabuhan yang menghubungkan ibu kota Tobelo dengan beberapa wilayah di sekitarnya, kemudian untuk akses dari luar Kabupaten Halmahera Utara dan juga dari dari luar Pulau Halmahera, terdapat jalur transportasi yang menghubungkan Bitung dengan Kabupaten Halmahera Utara, kawasan konservasi terdapat di Perairan Tobo-tobo Kecamatan Loloda Kepulauan yang sudah mulai menjadi kawasan yang dilindungi oleh masyarakat sekitar dan pemerintah untuk kelestariannya, untuk alur pelayaran dan perlintasan terdapat di Pelabuhan Tobelo Kecamatan Tobelo dan pelabuhan kapal feri Gorua di Kecamatan Tobelo Utara, alur pipa dan kabel bawah laut menghubungkan Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Pulau Morotai, alur migrasi biota laut contohnya lumba-lumba dan paus sebagai mamalia laut yang hampir terlihat melintasi sepanjang perairan yang ada di garis pantai pesisir Kabupaten Halmahera Utara.
2. Hasil evaluasi pemanfaatan ruang Kawasan Pesisir Di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan RZWP-3-K Provinsi Maluku Utara dengan kawasan deliniasi penelitian yang diambil memiliki bobot dalam kelas Kabupaten yang dimana untuk konsistensi struktur ruang nya memiliki bobot 40% dan konsistensi pola ruang nya memiliki bobot 60%, yang dapat dihitung bahwa untuk evaluasi pemanfaatan ruang kawasan pesisir di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan RZWP-3-K Provinsi Maluku

Utara dalam aspek struktur ruang hanya memiliki bobot 24,09 % dan untuk pola ruang hanya memiliki 24 % dengan keseluruhan nilai bobot 48,09 % yang diklasifikasikan yaitu tingkat kesesuaian sedang (>25%-50%), dalam artian pemanfaatan ruang di daerah penelitian masih sepenuhnya belum sesuai dengan rencana tata ruang atau aturan yang berlaku..

SARAN

- Dalam tujuannya penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengangkat kondisi pemanfaatan ruang di wilayah penelitian yang sedang terjadi sekarang ini pemanfaatan ruang oleh masyarakat yang menjadi kegiatan masyarakat sehari-hari, yang dimana untuk melihat kesesuaian dengan aturan yang berlaku
- Bagi pemerintah pun kiranya dapat menjadi acuan dalam memanfaatkan dan meningkatkan pemanfaatan yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku melalui hasil penelitian yang mendapati hasil yaitu pemanfaatan ruang masih belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang atau aturan yang berlaku dengan harapan bisa menjadi masukan dan acuan untuk melakukan pengembangan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Heryanto. 2011. Roh dan Citra Kota. Brilian Internasional
- Dr. Asfi Manzilati, SE.,ME. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi. Universitas Brawijaya Press.
- Dryon Taluke, Ricky S. M Lakat & Amanda Sembel. 2019. Analisis Preferensi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pesisir Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal

- Spasial Vol 6. No. 2, 2019 ISSN 2442-3262
- Eko Sugiarto. 2015. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis. Suaka Media
- Fitriani. 2013. Analisis Penyimpangan Pemanfaatan Ruang Aktual Terhadap Rencana Detail Tata Kecamatan Jogonalan Tahun 2013-2018
- Gerry Alexandro Paulus. Teritori Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Spasial Vol 5. No. 2, 2018. ISSN 2442 3262
- Gisella A. Dapas, Sonny Tilaar, Windy Mononimbar. 2020. Analisis Kawasan Pariwisata Pesisir Pantai Di Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Jurnal Spasial Vol. 7 No. 2 2020 ISSN 2442 3262
- Guru Yulianus Mataputun, Rosye j. Poluan. 2018. Daya Dukung Sarana, Prasarana, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Spasial Vol 5, No. 3, 2018 ISSN 2442 3262
- Ibrahim, 1998. Pemantauan pengendalian pemanfaatan ruang
- Ismar Hi Garuan, Suranto. 2016. Evaluasi Program Penataan Kawasan Pesisir Kota Ternate (Studi Kasus Program Reklamasi Pantai Halmahera 2014). Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1
- Joflius Dobiki. 2018. Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Spatial Vol 5, No. 2, 2018 ISSN 2442 3262
- Kasmawati Madjid, Sangkertadi, Surijadi Supardjo. 2019. Analisis Potensi Pengembangan Objek Wisata Pantai Tugulufa Kota Tidore. Jurnal Spasial Vol. 6 No. 2, 2019 ISSN 2442 3262
- Kementerian Pekerjaan Umum, Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang
- Muta'ali, Luthfi. 2013. Penataan Ruang Wilayah dan Kota. Yogyakarta: BPGF Universitas Gadjah Mada.
- Nur Anwar, Sutrisno Anggoro, Dwi P Sasongko. 2012. Evaluasi Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Universitas Diponegoro, Semarang
- Osiani Apena, Dwight M. Rondonuwu, & Roosje J. Poluan. 2021. Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir Di Kecamatan Mandolang. Jurnal Spasial Vol 8. No. 1, 2021 ISSN 2442-3262
- Prahasta, 2009. Teknik, jenis fungsi, evaluasi, logika, atau operator matematis yang digunakan didalamnya akan bergantung pada jenis atau tipe (*query*) analisis spasial itu sendiri
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/PRT/M/2009. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Jakarta.
- Rudiya Muhammad & Ingerid L. Moniaga. 2020. Faktor Faktor Penyebab Tidak Optimalnya Fungsi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Maluku Utara Di Kecamatan Oba Utara. Jurnal Spasial Vol 7. No. 1, 2020 ISSN 2442 3262
- Ristanti Konofu, Veronika Kumurur, Fella Warou. 2018. Topologi Kepemilikan RTH Di Perkotaan Tobelo. Jurnal Spasial Vol 4 No. 1, 2017 ISSN 2442 3262
- Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Ngaglik Tahun 2009-2018. Skripsi. Surakarta: Fakultas Geografi, Universitas
- Suharsimi Arikunto (1998) metode pengumpulan Muhammadiyah Surakarta. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2038
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2007. Penataan Ruang. Jakarta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)

Wijanarko Noor Imam Susilo. 2015. Evaluasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2013-2014 Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr). Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.